

BAB IV

VISI DAN MISI PEMBANGUNAN TAHUN TAHUN 2005-2025

4.1. Visi

Berdasarkan kondisi diatas, tantangan dan prediksi yang akan dihadapi dalam 20 tahun mendatang serta dengan mempertimbangkan modal dasar berupa Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Sosial, Budaya dan Ekonomi yang dimiliki, maka Visi Pembangunan Kota Padang tahun 2004-2020 tidak dilakukan revisi. Artinya Visi pembangunan Kota Padang yang tertuang dalam RPJP tahun 2004-2020 akan tetap digunakan sebagai visi pembangunan kota Padang tahun 2005-2025, yaitu:

“Terwujudnya masyarakat madani yang berbasis industri, perdagangan dan jasa yang unggul dan berdaya saing tinggi dalam kehidupan perkotaan yang tertib dan teratur.”

Visi pembangunan Kota Padang tahun 2005-2025 ini merupakan komitmen politis masyarakat yang mengarah pada pencapaian tujuan nasional dan tujuan pembangunan Provinsi Sumatera Barat yang menetapkan Kota Padang sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan salah satu kawasan andalan/ kegiatan utama berupa Jasa dan Sumber Daya Manusia.

Ada beberapa kata kunci dalam visi yang perlu dijelaskan agar terbangun satu pengertian dan pemahaman yang sama, yaitu:

- **Madani.** Kata madani sering diartikan perkotaan atau beradab yang amat relevan dengan tatanan kehidupan yang demokratis. Komunitas madani dapat berarti komunitas perkotaan (*urban community*) atau komunitas demokratis (*democratic community*).

Komunitas madani berpegang teguh pada demokrasi, menghargai hak asasi manusia, taat hukum dan menghormati nilai keadilan dan peradaban. Komunitas madani sering disebut *civil society* karena tatakrama kehidupan diatur oleh hukum dan undang-undang berdasarkan kesepakatan tentang kesetaraan untuk kemajuan yang membentuk budaya perkotaan (*urban culture*). Komunitas madani memiliki kebebasan dalam membicarakan kepentingan bersama dan menyalurkannya kepada berbagai lembaga yang relevan. Komunitas madani menolak kekuatan yang berlebihan pada satu tangan atau kelompok dan mendominasi pemilikan kekayaan. Negara menjamin tersedianya ruang dan barang publik serta layanan publik, Investasi pemerintah disepakati untuk menjamin kepentingan bersama yang universal yaitu kebebasan, keadilan dan kemakmuran. Di Kota Padang konsep madani selaras dengan adat dan budaya Minangkabau khususnya dan budaya Indonesia yang proaktif dan produktif serta peduli dan penyayang. Konsep yang belum sepenuhnya teraplikasi dalam tatakrama kehidupan karena pengetahuan dan pemahaman tentang adat dan agama yang berkaitan dengan etika dan moral tersebut belum mantap. Konsep adat dan agama kadangkala masih dipertentangkan satu sama lain atau tidak mengaplikasikan keseluruhan konsep secara penuh (kaffah).

- **Masyarakat madani sejahtera.** Kehidupan komunitas sejahtera bergantung kepada aplikasi budaya perkotaan yang proaktif produktif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Kesejahteraan ditentukan pula oleh sikap yang peduli dan penyayang serta tindakan yang ramah dan bertanggungjawab yang sesuai dengan konsep madani tersebut. Masyarakat madani berbasis budaya perkotaan yang demokratis dapat meningkatkan kesejahteraannya apabila konsep dasar madani diaplikasikan dalam kehidupan secara konsisten dan konsekuen. Konsep

madani sejahtera belum sepenuhnya dapat teraplikasi dalam tatakrama kehidupan komunitas Kota Padang karena berbagai kelemahan internal dan kendala eksternal. Komunikasi intensif secara vertikal dan horizontal diperlukan bagi pembentukan komunitas madani harus menjadi prioritas.

- **Industri, perdagangan, jasa.** Sektor industri, perdagangan dan jasa merupakan kegiatan ekonomi sekunder dan tersier yang relevan dengan konsep perkotaan sesuai fungsi dan peran kota terhadap pembangunan daerah. Perdagangan adalah kegiatan ekonomi utama di perkotaan dimana kota-kota tumbuh karena terbangun simpul-simpul permintaan dan penawaran atau pasar sebagai media transaksi antara produsen atau konsumen atau antar produsen. Industri adalah kegiatan ekonomi pendukung perdagangan atau sebagai efek dari perdagangan dalam bentuk kumpulan kegiatan ekonomi yang saling berkait dan membentuk manufaktur. Jasa ialah kegiatan ekonomi pendukung perdagangan dan industri yang memberi berbagai bentuk pelayanan fisik dan nonfisik untuk pertumbuhan kegiatan ekonomi tersebut. Bidang pendidikan dan kesehatan termasuk sektor jasa yang dapat dikatakan sebagai efek pertumbuhan industri dan perdagangan dan jasa-jasa lainnya atau sebaliknya bersifat mendukung perkembangan sektor tersebut. Kegiatan industri berdimensi sosial walaupun prosedur ekonomi tetap menjadi dasar pertimbangan adalah industri pariwisata berbasis komunitas yang memiliki sumberdaya alam ataupun industri kesehatan dan industri pendidikan. Kata kunci sektor industri adalah sistem, standar, kinerja yang berkaitan dengan mekanisme untuk menghasilkan barang dan/atau jasa dalam jumlah dan mutu tertentu. Berdasarkan kata kunci itu, industri pendidikan dan industri kesehatan adalah sektor industri berdimensi sosial. Di Kota Padang, perdagangan memberi warna bagi kegiatan ekonomi kota sejak lama dan terus meningkat

perkembangannya namun dapat mengalami pasang surut karena efek eksternal. Kenyataan menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi kota seterusnya lapangan pekerjaan serta pendapatan masyarakat sebagian besar berasal dari sektor perdagangan. Sektor industri belum tumbuh-kembang sebagai efek dari perdagangan namun diharapkan dapat meningkat pada masa datang terutama industri berbasis pengolahan pada skala kecil dan menengah dikaitkan dengan ambang permintaan yang relatif kecil pada skala lokal maupun regional. Perkembangan sektor jasa selaras dengan perdagangan dan industri karena bersifat menunjang kegiatan ekonomi perkotaan. Industri pendidikan dan kesehatan cukup baik perkembangannya namun mendapat saingan makin kuat dari kawasan lainnya yang juga mengembangkan sektor-sektor tersebut.

- **Berdaya saing tinggi.** Keunggulan (*comparativeness*) dan daya saing (*competitiveness*) dapat dicapai jika harga dan mutu barang dan jasa yang diproduksi memenuhi kriteria skala ekonomis (*economies of scale*) dan lingkup ekonomis (*economies of scope*). Keunggulan dan daya saing dapat dicapai melalui strategi fokus kepada kawasan andalan dan sektor unggulan supaya sumberdaya dapat dimanfaatkan secara ekonomis, efektif dan efisien. Komoditi yang unggul dapat menerobos pasar global melalui jejaring ekonomi yang terbangun. Sumberdaya manusia harus memiliki keandalan (*competency*) dan keunggulan supaya dapat bersaing pada skala regional, nasional dan global melalui pemupukan keandalan global dalam berbahasa, berkomunikasi dan bersikap sesuai standar global. Ini harus diaplikasikan dalam kurikulum pendidikan dan pelatihan semua jenjang termasuk kurikulum pendidikan dan pelatihan bagi aparatur pemerintah dan para pengurus organisasi sosial.
- Pembangunan sumberdaya manusia yang tidak selaras dengan perubahan pasar internasional akan makin tertinggal dalam

persaingan global. Pasar kerja lokal dihadapkan kepada terbukanya pasar kepada tenaga kerja asing dengan keandalan dan keunggulan berstandar global. Di Kota Padang, keunggulan dan daya saing barang dan jasa relatif rendah jika dikaitkan dengan standar global sehingga kecenderungan menjadi pasar bagi berbagai barang dan jasa dari luar sangat tinggi. Artinya, amat sedikit barang dan jasa yang dapat dikategorikan unggul dan berdaya saing sehingga sangat mungkin peluang masuknya barang dan jasa dari luar yang menjadikan kita sebagai pengguna bukan penghasil. Mutu tenaga kerja relatif rendah berdasarkan indeks keandalan dasar (basic competency) yaitu pengetahuan, keterampilan dan sikap terhadap persaingan global tersebut.

- **Kehidupan perkotaan.** Heterogenitas adalah kata kunci yang menjelaskan pola perkotaan yang berbeda dengan homegenitas pada pola pedesaan. Keragaman membawa konsekuensi kepada pemajuan produk hukum untuk mengatur dan mengendalikan keragaman tersebut. Keragaman itu dapat memacu persaingan yang sehat atau sebaliknya berdasarkan keandalan individu. Keragaman dapat menyuburkan budaya perkotaan yang universal. Di Kota Padang, kehidupan perkotaan dengan persaingan yang kurang sehat tidak menonjol namun dapat berkembang di masa datang jika supremasi produk hukum lemah.
- **Perkotaan yang tertib dan teratur.** Kemoderenan adalah kata kunci yang dapat menjelaskan ketertiban dan keteraturan. Kemoderenan lawan keterbelakangan bukan ketradisionalitas sehingga beberapa bagian budaya yang tradisional masih mungkin dikonversikan kepada budaya moderen. Kemoderen didukung oleh penggunaan teknologi berbasis sistem dan prosedur sehingga celik (mengerti, mampu, tahu) teknologi menjadi satu kebutuhan mutlak bagi komunitas perkotaan. Jika

kehidupan perkotaan sangat bergantung kepada penegakan supermasi hukum termasuk pelanggaran yang dapat mengacau penggunaan teknologi tersebut. Di Kota Padang, teknologi sudah mulai diaplikasikan dalam berbagai bidang kehidupan untuk mendukung produktivitas dan profesionalisme namun belum mencapai taraf pemanfaatan yang tinggi. Ketertiban dan keteraturan berkaitan dengan perilaku hidup individu dan keluarga seperti kepedulian terhadap faktor kebersihan lingkungan dengan membuang sampah pada waktu dan tempatnya. Ini akan menjadikan kota menjadi lingkungan sehat karena dapat menghindari wabah penyakit yang menyertai banjir. Penduduk Kota Padang yang heterogen dapat diatur dan ditertibkan dengan menerapkan hukum dan undang-undang dengan dukungan teknologi beserta sistem dan prosedur bagi menjamin hak dan kewajiban komunitas perkotaan. Hukum dan undang-undang membangun kepedulian sosial dan ketahanan sosial dan dapat menghindari kerawanan dan konflik sosial. Kehidupan perkotaan sangat tergantung kepadanya kemoderen yang bermakna ketertiban dan keteraturan tersebut.

4.2 Misi

Dalam mewujudkan visi dari pembangunan Kota Padang yang sudah dijelaskan pada bagian diatas, maka ditempuh melalui penjabaran dalam bentuk misi pembangunan kota Padang sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman terhadap adat dan agama dan pengamalan nilai-nilainya dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia.
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing tinggi.
4. Meningkatkan penataan ruang, prasarana dan sarana secara terpadu kearah keseimbangan pembangunan kawasan yang berkelanjutan.
5. Membangun kehidupan kota metropolitan yang tertib dan teratur.

6. Menata sistem pemerintahan yang baik dan bersih.
7. Menciptakan masyarakat sadar, peduli dan tangguh bencana.

4.3 Tujuan dan Sasaran

4.3.1. Tujuan

Tujuan pembangunan daerah adalah meningkatkan daya guna dan nilai guna dari sumberdaya lokal melalui pola pemanfaatan yang terkendali. Pembangunan dapat dilihat dari perubahan wujud fisik atau diukur dari pertumbuhan ekonomi ataupun diamati melalui perubahan perilaku sosial. Artinya, pembangunan harus terarah dan terkendali agar sesuai dengan norma yang berlaku. Ini menuntut peralihan paradigma para pelaku pembangunan kearah peningkatan produktivitas melalui formalisasi usaha dan profesionalisme dalam pengelolaan usaha. Pembangunan menuntut perubahan dan penyesuaian semua pihak yang terlibat dalam proses baik sebagai penghasil ataupun pengguna. Kedudukan pemerintah amat menentukan sebab pengarah, pengerahan dan pengendalian pembangunan berada di tangan pemerintah. Keberhasilannya tergantung kepada bantuan para usahawan dan dukungan masyarakat. Secara spesifik, tujuan pembangunan jangka panjang adalah:

1. Terciptanya kehidupan kota yang multikultural.
2. Terciptanya sumberdaya manusia yang cerdas, berbudi pekerti dan sehat
3. Terwujudnya iklim investasi yang kondusif yang mendorong peningkatan produktivitas dan nilai tambah komoditas
4. Terwujudnya keseimbangan pembangunan kawasan yang ramah lingkungan dengan sarana dan prasarana yang tertata dengan baik yang berkelanjutan
5. Terciptanya ketertiban, keamanan dan kenyamanan kehidupan kota metropolitan

6. Terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih
7. Terciptanya masyarakat siaga bencana

Dalam upaya mencapai ketujuh tujuan tersebut diperlukan komitmen pemerintah dan keterlibatan para pelaku pembangunan secara aktif. Untuk itu, kejelasan dan kepastian mekanisme kerja harus berorientasi pada hasil dan manfaat serta dampak terhadap kemajuan daerah dalam jangka pendek, menengah dan panjang. Disamping itu diperlukan upaya penegakan hukum sebagai prasyarat untuk mendorong percepatan dan pemerataan pembangunan daerah.

4.3.2 Sasaran Pembangunan

Sasaran pembangunan adalah semakin membaiknya taraf ekonomi dan sosial komunitas kota berdasarkan kelompok sasaran yang terkait dengan kebijakan pembangunan. Sasaran pembangunan jangka panjang secara umum untuk pembangunan kota Padang adalah:

1. Kemiskinan dalam arti luas yang menyangkut aspek fisik dan mental makin berkurang sehingga berbagai faktor ikutannya dapat diatasi.
2. Pengangguran semakin berkurang melalui perluasan kesempatan berusaha dan bekerja sehingga berbagai faktor ikutannya dapat diatasi.
3. Ketimpangan dalam distribusi kekayaan antar kelas ekonomi dapat dikurangi melalui regulasi sehingga berbagai faktor ikutannya dapat diatasi.

Sedangkan sasaran pokok pembangunan berdasarkan visi dan misi adalah sebagai berikut :

1. Terbangunnya kehidupan beradat dan beragama secara harmonis
2. Terwujudnya kualitas pendidikan keluarga dan masyarakat

3. Terwujudnya investasi daerah yang berbasis perdagangan dan pariwisata
4. Terwujudnya kesesuaian penataan ruang dengan pemanfaatannya
5. Terciptanya kehidupan kota metropolitan yang aman, nyaman dan tertib
6. Tercapainya peningkatan kualitas pelayanan publik dan kepuasan masyarakat
7. Tercapainya penurunan risiko bencana

Pemerintah diberi amanah untuk ‘menguasai dan mengelola’ kekayaan negara dimana pelaksanaan tugas, fungsi dan peran tersebut dibantu para usahawan dan didukung masyarakat. Secara spesifik pemerintah diberi tanggung jawab terhadap fakir miskin dan anak-anak terlantar dan mengalokasikan bantuan secara langsung ataupun tidak langsung. Selain itu, pemerintah diberikan tugas untuk mengatur kegiatan perekonomian diantara para pelaku yaitu pemerintah berupa badan usaha milik negara atau daerah dan dunia usaha berupa badan usaha perseorangan ataupun persekutuan serta masyarakat berupa badan usaha koperasi. Kemampuan aparatur pemerintah dalam penguasaan dan pengelolaan kekayaan negara sangat menentukan pencapaian sasaran pembangunan.

Ketiga kelompok pelaku pembangunan dapat bekerja mandiri atau beraliansi atau bermitra dalam pemanfaatan sumberdaya pembangunan untuk mencapai sasaran pembangunan tersebut. Pendekatan pembangunan melalui kawasan-kawasan pada beberapa titik yang potensial dengan sektor unggulan diharapkan dapat mencapai sasaran pembangunan tersebut. Kebijakan pemerintah yang mengendalikan pemanfaatan sumberdaya sangat menentukan berkait dengan pengelolaan usaha yang mempertimbangkan sumberdaya lokal.

Hubungan Misi dengan tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Padang disajikan dalam Tabel berikut.

Tabel 4. 1
Misi, tujuan dan sasaran RPJPD Kota Padang

Misi	Tujuan	Sasaran
Meningkatkan pemahaman terhadap adat dan agama dan pengamalan nilai-nilainya dalam kehidupan bermasyarakat	Terciptanya kehidupan kota yang multikultural.	Terbangunnya kehidupan beradat dan beragama secara harmonis
Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia.	Terciptanya sumberdaya manusia yang cerdas, berbudi pekerti dan sehat	Terwujudnya kualitas pendidikan keluarga dan masyarakat
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing tinggi.	Terwujudnya peningkatan ekonomi dan penciptaan lapangan pekerjaan dengan iklim investasi yang kondusif untuk mendorong peningkatan produktivitas dan nilai tambah komoditas	Terwujudnya investasi daerah yang berbasis perdagangan dan pariwisata
Meningkatkan penataan ruang, prasarana dan sarana secara terpadu kearah keseimbangan pembangunan kawasan yang berkelanjutan.	Terwujudnya keseimbangan pembangunan kawasan yang ramah lingkungan dengan sarana dan prasarana	1. Terwujudnya kesesuaian penataan ruang dengan pemanfaatannya 2. Tersedianya sarana dan prasarana perkotaan yang ramah

Misi	Tujuan	Sasaran
	yang tertata dengan baik yang berkelanjutan	lingkungan
Membangun kehidupan kota metropolitan yang tertib dan teratur.	Terciptanya ketertiban, keamanan dan kenyamanan kehidupan kota metropolitan	Terciptanya kehidupan kota metropolitan yang aman, nyaman dan tertib
Menata sistem pemerintahan yang baik dan bersih.	Terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih	Tercapainya peningkatan kualitas pelayanan publik dan kepuasan masyarakat
Menciptakan masyarakat sadar, peduli dan tangguh bencana	Terciptanya masyarakat siaga bencana	Tercapainya penurunan risiko bencana